

BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Empiris

Tabel 2.1 Tinjauan Empiris

No	Judul Penelitian dan Peneliti	Tahun	Variabel	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Dampaknya Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh) oleh : Darwanis dan Ryanda Saputra	2014	Dependen : Kinerja Keuangan, Independen : Belanja Modal, Intervening : PAD	terdapat pengaruh belanja modal terhadap pendapatan asli daerah.	Variabel yang digunakan dalam penelitian ini tidak menggunakan intervening dan menambahkan variabel varians anggaran dan pendapatan perkapita
2.	Analisis Pengaruh Realisasi Belanja Pemerintah Terhadap Penerimaan	2020	Dependen : Penerimaan Pajak, Independen : Belanja Pemerintah, Kontrol :	realisasi belanja pemerintah berpengaruh terhadap penerimaan	Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini tidak hanya belanja negara namun juga mencakupi pendapatan perkapita

	Pajak Di Indonesia Oleh : Tria Sandi Kurniawan, Dyah Wulan Sari dan Dyah Reni Irmawati		GDP	perpajakan.	dan varians anggaran serta tidak menggunakan variabel kontrol GDP
3.	<i>A Causality Relationship Beetwen Tax Revenue And Expenditure In Indonesia</i> oleh : Jaka Sriyana	2009	Pendapatan Pajak dan Belanja Negara	terdapat hubungan antara pendapatan pajak dengan pengeluaran pemerintah.	Dalam penelitian ini juga mempertimbangkan faktor kinerja anggaran DJP dan pendapatan perkapita.
4.	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Oleh : Phany Ineke Putri	2013	Dependen : Jumlah Penduduk, Pendapatan Per Kapita, Inflasi, Surat Ijin Usaha Perdagangan, Independen : Pendapatan Pajak Reklame	bahwa pendapatan perkapita daerah mempunyai pengaruh positif terhadap penerimaan pajak reklame.	Dalam penelitian ini juga mempertimbangkan faktor lain seperti belanja pemerintahan dan analisis varians anggaran yang tujuannya untuk mempertimbangkan faktor kinerja pemerintah

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Teori *Displacement Effect*

Teori displacement effect merupakan teori yang dicetuskan oleh Peacock dan Wiseman pada tahun 1961, teori ini didasarkan pada *wagner's law*, yang menyatakan bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka akan semakin tinggi pula belanja/pengeluaran pemerintah, dimana teori *displacement* ini menyatakan bahwa terdapat tingkat resistensi dalam membayar pajak sehingga apabila negara dalam keadaan tertentu menaikkan pendapatan perpajakan untuk meningkatkan belanja pemerintahan maka masyarakat memiliki tingkat tertentu dimana mereka merasa bersedia membayar pajak sehingga disitulah tercipta keseimbangan dalam pembayaran pajak, namun apabila terjadi kenaikan pajak maka *displacement effect* akan terulang lagi. Selain dalam teori tersebut menurut Peacock dan Wiseman menyatakan bahwa pemerintah cenderung untuk meningkatkan penerimaan perpajakan meskipun presentase pembayaran pajak tidak berubah, namun pengeluaran pemerintah juga semakin membesar. Teori ini diperkuat dengan pendapat Friedman (Friedman, Summer 1978) menaikkan pajak tidak akan dapat menutupi defisit, dengan meningkatkan pajak maka justru malah meningkatkan pengeluaran pemerintah, maka pemerintah harus menekan defisit sebaik mungkin sehingga diterima oleh masyarakat, maka dalam meningkatkan penerimaan perpajakan pemerintah tidak harus selalu meningkatkan presentase dari pajak itu sendiri namun harus memperkuat kemampuan/kapasitas dari pemungutan pajak, maka dalam teori ini terdapat hubungan dengan penelitian ini yang dilakukan untuk mengetahui apakah dengan meningkatnya belanja pemerintah dapat mempengaruhi Pendapatan Pajak Di KPP.

2.2.2 Pendapatan Per Kapita

Pendapatan perkapita merupakan pendapatan rata – rata penduduk di suatu negara yang didapat dengan membagi pendapatan nasional dengan jumlah penduduk, pendapatan perkapita memiliki beberapa manfaat (Muchtolifah, 2010) yaitu :

- a. Mengetahui tingkat kemakmuran suatu Negara
- b. Mengetahui hasil rangkaian kegiatan ekonomi suatu Negara selama satu tahun.
- c. Sumber informasi dan alat analisis yang sangat penting, karena menggambarkan situasi dan struktur ekonomi, tingkat perkembangan, kekuatan dan kelemahan ekonomi negara tersebut.

- d. Dasar pertimbangan bagi pemerintah dalam menyusun atau merumuskan kebijakan untuk mendorong laju pertumbuhan dan pembangunan ekonominya.
- e. Mengukur tingkat inflasi yang sedang terjadi

Pendapatan per kapita merupakan gambaran/indikator dari pertumbuhan suatu ekonomi di negara menurut hukum Wagner's pengeluaran pemerintah semakin meningkat dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, dan dari pengeluaran pemerintah itu akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi hal ini dinyatakan dalam penelitian yang dilakukan oleh Barro (Barro, 1990) hal ini disebabkan dengan adanya pengeluaran pemerintah yang menginvestasikan pada infrastruktur, kesehatan dan pendidikan akan meningkatkan modal sumber daya manusia yang akan berdampak pada kenaikan pendapatan perkapita, dan sumber dana dari pengeluaran pemerintah/belanja pemerintah tersebut didapat dari penerimaan perpajakan.

2.2.3 Analisis Varians Anggaran

Anggaran merupakan rencana finansial untuk masa yang akan datang, anggaran juga dapat membantu mengidentifikasi tujuan dan tindakan yang diperlukan untuk mencapainya (Hansen & Mowen, 2007), tidak berbeda dengan perusahaan, pemerintah juga diwajibkan untuk menyusun anggaran dalam hal ini pemerintah juga diwajibkan untuk menyusun anggaran yaitu APBN yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dalam menggunakan APBN maka perlu diikuti tanggungjawab untuk menyusun Laporan Keuangan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 5 ayat 1 bahwa komponen laporan keuangan pemerintah pusat/ daerah terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, sedangkan dalam Pasal 5 ayat 2 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan.

Dalam penganggaran dikenal analisis varians anggaran, analisis varians anggaran merupakan perbandingan antara *standard cost* dengan peforma sebenarnya (Shim & Siegel, 2005) sedangkan menurut Hansen, Don R. & Mowen Maryanne M. (Hansen & Mowen, 2007) varians adalah perbedaan antara biaya input sebenarnya dan dengan biaya

yang direncanakan , kegunaan dari analisis ini adalah untuk dapat mengontrol biaya dan mengevaluasi dari peforma/kinerja dengan membandingkan anggaran selain itu juga untuk membantu menentukan/pengambilan keputusan dan untuk memberikan motivasi bagi pegawai untuk mencapai target yang ditentukan. Dalam pemerintahan varians anggaran juga digunakan yaitu dalam bentuk laporan realisasi anggaran pengertian dari laporan realisasi anggaran Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah dalam Pasal 1 angka 4 adalah “laporan yang menggambarkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama suatu periode” ketentuan lebih lanjut mengenai isi dari laporan realisasi anggaran adalah pada Pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahwa laporan realisasi anggaran berisi tentang realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang diperbandingkan dengan anggarannya dan dengan realisasi periode sebelumnya, dalam PSAP 02 bahwa Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah “memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Dalam PSAP 02 juga memuat manfaat dari laporan realisasi anggaran adalah menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi dan menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 1 angka 2 “Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur”, yang dapat diartikan bahwa hubungan antara penggunaan anggaran terhadap kinerja pencapaian target DJP adalah menggunakan anggaran untuk memungut pajak untuk meningkatkan pendapatan pajak negara.

2.2.4 General Government Spending

Government spending/ government expenditure adalah belanja yang dilakukan oleh pemerintah dalam Undang – Undang No 17 Tahun 2008 Tentang Keuangan Negara belanja pemerintahan dibagi menjadi dua jenis yaitu belanja negara dan belanja daerah, dalam pengertian belanja negara dan belanja daerah merupakan kewajiban pemerintah

pusat/daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Menurut PSAP no.1 definisi dari belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui ketika terjadinya pengeluaran dari kas/ rekening negara atau daerah dimana pengakuannya harus dipertanggungjawabkan dan disahkan oleh unit yang memiliki fungsi pembendaharaan. Belanja sendiri dalam diklasifikasikan berdasarkan klasifikasi ekonomi yang diklasifikasikan sebagai berikut :

Tabel 2.2 Klasifikasi Belanja Pemerintah

PEMERINTAHAN PUSAT	PEMERINTAHAN DAERAH
Belanja Operasi: - Belanja Pegawai - Belanja Barang - Bunga - Subsidi - Hibah - Bantuan Sosial	Belanja Operasi: - Belanja Pegawai - Belanja Barang - Bunga - Subsidi - Hibah - Bantuan Sosial
Belanja Modal : - Belanja aset tetap - Belanja aset lainnya	Belanja Modal : - Belanja aset tetap - Belanja aset lainnya
Belanja Lain-lain :	Belanja Tak Terduga :

Belanja – belanja tersebut dikelompokkan dalam 3 macam yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal yang memiliki pengertian dalam PSAP Nomor 2 sebagai berikut :

1. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang Memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial.
2. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang Memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal

meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud.

3. Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.

Untuk mengukur seberapa besar pemerintah daerah melakukan belanja terhadap produk domestik bruto daerah maka digunakan indikator/ rasio General Government Spending yang diukur dengan menggunakan perbandingan antara belanja pemerintah daerah terhadap PDRB tujuan dari pengukuran ini dapat diketahui bahwa semakin meningkatnya belanja pemerintah terhadap PDRB dan juga dapat digunakan untuk mengukur besar ukuran dari pemerintah dilihat dari seberapa besar yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk kepentingan publik (OECD, 2013).

2.2.5 Pendapatan Pajak

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, dalam Pasal 1 angka 1 berbunyi pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Semakin tingginya pendapatan negara dari pajak maka akan mempermudah negara untuk dapat mengalokasikan dananya untuk menjalankan pemerintahan, dalam penelitian yang dilakukan oleh Monsen, Mosayeb dan Yousef (Mehrara, Pahlavani, & Elyasi, 2011) Indonesia cenderung menerapkan sistem politik yang menentukan seberapa besar anggaran yang dikeluarkan dan selanjutnya akan mengatur peraturan perpajakan dan sumber pendapatan anggaran sehingga dapat membiayai anggaran (*spend and tax hypothesis*), penggunaan anggaran untuk kepentingan belanja negara dapat memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pendapatan pajak masuk kedalam pendapatan LRA dan Pendapatan LO, basis akrual digunakan dalam pengakuan

pendapatan LO dimana pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Sedangkan dalam bentuk basis kas yang pengakuan pendapatan LRA berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

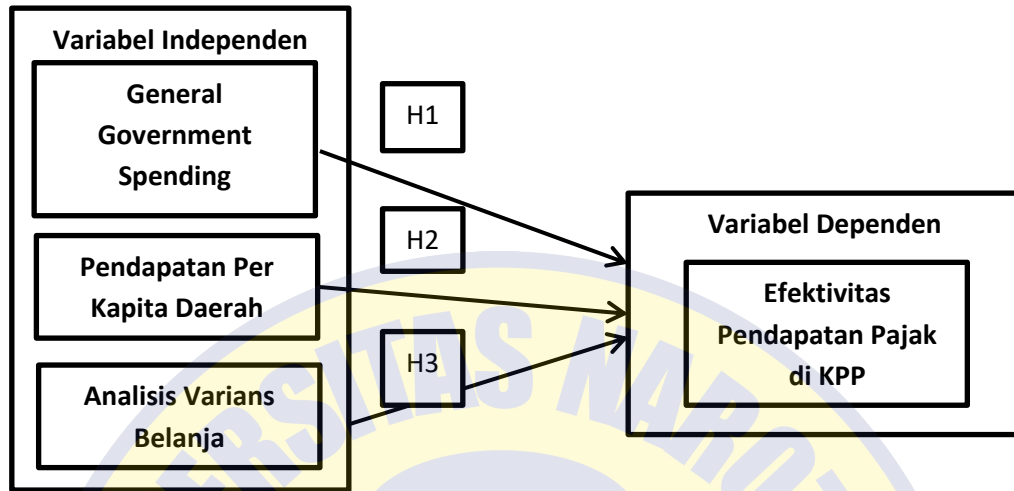
2.2.6 Efektivitas Pendapatan Pajak

Efektivitas diukur dengan menilai apakah keluaran dapat berfungsi sebagaimana diharapkan sehingga mendatangkan hasil (outcome) yang diinginkan. Dengan demikian, dalam anggaran berbasis kinerja, tujuan dan indikator kinerja dari suatu program/kegiatan harus ditentukan dengan jelas dan terukur untuk mendukung perbaikan efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatan sumber daya dan memperkuat proses pengambilan keputusan (Nasution, 2019), tujuan dari adanya pengukuran efektivitas ini adalah untuk memenuhi pendekatan dalam penyusunan anggaran yang terdapat dalam UU no 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara salah satunya adalah penganggaran berbasis kinerja dimana setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah sebelumnya harus ditentukan target yang ingin dicapai dan nantinya akan menjadi evaluasi bagi pemerintahan dengan membandingkan realisasi pencapaiannya semakin dekat realisasi dengan targetnya maka akan semakin efektif kinerja pemerintahan, begitu pula dengan pendapatan pajak semakin dekatnya pendapatan pajak yang terealisasi maka semakin efektifnya pemerintah dalam memungut pajak. Dalam SAP 2019 efektivitas dan efisiensi merupakan manfaat informasi dari laporan realisasi anggaran yang dapat digunakan sebagai bentuk evaluasi dari keputusan – keputusan dari penggunaan sumber daya ekonomi.

2.3 Rerangka Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian dan landasan teori diatas maka rerangka penelitian ini adalah sebagai berikut disajikan dalam bentuk diagram :

Gambar 2.1 Rerangka Penelitian



2.4 Pengembangan Hipotesis Penelitian

2.4.1 General Government Spending Terhadap Pendapatan Efektivitas Pajak di KPP

General Government spending merupakan pengeluaran pemerintah/belanja *general government spending* dapat juga disebut dengan *general government expenditure* pengeluaran/belanja ini berhubungan dengan barang dan jasa terhadap PDB/PDRB. Meskipun pajak bukan seperti retribusi yang mendapatkan efek langsung terhadap pembayar retribusi namun para pembayar pajak tetap memiliki keinginan untuk dapat menikmati hasil dari pembayaran pajaknya kepada pemerintahan seperti dalam bentuk pelayanan/jasa ataupun dalam bentuk barang/infrastruktur. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Tria Sandi Kurniawan, dkk (Kurniawan, Sari, & Irmawati, 2020) bahwa terdapat hubungan antara belanja/pengeluaran pemerintah dan pendapatan pajak, maka hipotesis penelitian yang dikembangkan adalah :

H1 : General Government Spending Daerah berpengaruh terhadap Efektivitas Pendapatan Pajak di KPP

2.4.2 Pendapatan Perkapita Daerah Terhadap Efektivitas Pendapatan Pajak di KPP

Pendapatan perkapita merupakan pengukuran rata – rata pendapatan setiap orang di suatu wilayah tertentu yang dapat menjadi salah satu indikator melihat kesejahteraan orang di daerah tersebut, semakin besarnya pendapatan perkapita di suatu daerah maka

akan semakin besar pula daya beli dan pendapatan maka akan meningkatkan pendapatan pajak yang berhubungan dengan PPH dan PPN yang dapat dipungut, Menurut Abhijit Sen Gupta (Gupta, 2007) pendapatan perkapita merupakan proksi yang menunjukkan keseluruhan tingkat perkembangan ekonomi dan struktur ekonomi yang berkolerasi positif dengan pendapatan pajak suatu negara, maka dalam hal ini hipotesis yang dikembangkan adalah :

H2 : Pendapatan perkapita daerah berpengaruh terhadap Efektivitas Pendapatan Pajak di KPP

2.4.3 Analisis Varians Belanja KPP Terhadap Efektivitas Pendapatan Pajak di KPP

Untuk dapat mencapai hasil output yang optimal maka diperlukan input yang optimal juga begitu pula dengan pemungutan pajak maka penggunaan anggaran merupakan input sedangkan pendapatan pajak merupakan output yang dihasilkan. KPP yang merupakan bagian dari instansi vertikal DJP, juga mendapatkan anggaran belanja dari DJP dimana kewajiban penggunaan anggaran tersebut harus dilaksanakan dengan optimal dan sebaik – baiknya maka untuk menilai optimal tersebut dapat diukur melalui analisis varians yang menunjukkan sejauh mana anggaran telah tercapai realisasinya, menurut penelitian yang dilakukan oleh Balogun, dkk (Balogun, Mamidu, & Owuze, 2015) bahwa anggaran memiliki pengaruh terhadap kinerja suatu perusahaan ini dikarenakan anggaran merupakan bentuk perencanaan dan pengukuran dari kinerja suatu perusahaan, maka semakin rendahnya nilai varians maka semakin tingginya penyerapan anggaran yang dicapai.

H3 : Analisis Varians Belanja KPP berpengaruh terhadap Efektivitas Pendapatan Pajak di KPP